

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran Defisit, DKI Genjot Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak hingga akhir tahun ditargetkan bertambah Rp 9 triliun.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan menggenjot penarikan pajak untuk menutup defisit anggaran daerah pada tahun ini. Kepala BPRD, Faisal Syafruddin, mengatakan salah satu sektor pajak yang akan digenjot ialah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). "Kami sekarang mencari potensi itu dengan jempot bola," ujar dia di Balai Kota, Rabu lalu.

Badan Pajak, menurut Faisal, akan mendatangi apartemen yang syarat pertelaannya belum selesai. Pertelaan merupakan dasar penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. "Begitu dipecah, mereka (akan) bayar BPHTB," ucapnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2019 DKI Jakarta tengah mengalami defisit. Berdasarkan data yang dihimpun *Tempo*, selisih antara pendapatan dan belanja yang tengah berjalan sempat mencapai Rp 3,187 triliun.

Anggaran DKI defisit karena dana bagi hasil Rp 6,39 triliun dari pemerintah pusat untuk pemerintah DKI triliun belum turun. Penyebab lainnya, penerimaan pajak daerah masih jauh dari target.

Berdasarkan data BPRD, hingga 17 Oktober 2019, penerimaan pajak baru mencapai Rp 31,56 triliun, atau sekitar 70,86 persen dari target pajak tahun ini sebesar Rp 44,54 triliun.

Faisal menambahkan, pemerintah DKI akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menagih BPHTB dari para pengembang apartemen yang pertelaannya sudah selesai. Sebab, kata dia, penghuni apartemen mungkin saja telah membayar BPHTB melalui pengembang, tapi uang itu belum disetorkan kepada BPRD.

Faisal memperkirakan potensi pendapatan dari BPHTB bisa mencapai Rp 2,4 triliun. Pada tahun ini, pendapatan BPHTB ditargetkan mencapai Rp 9,5 triliun. Adapun realisasi pendapatan dari BPHTB per 17 Oktober 2019 baru mencapai Rp 3,35 triliun, atau sekitar 35,28 persen dari target.

BPRD juga akan menggenjot pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan dua peraturan tentang keringanan pajak daerah. Pertama, Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kedua, Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Administrasi Piutang Pajak Daerah.

Melalui kedua peraturan itu, pemerintah DKI memberikan potongan atas pokok pajak untuk BBNKB, PBB, dan PKB. Biaya pokok BBNKB dipangkas hingga 50 persen untuk tunggakan pada

2019. Sedangkan potongan biaya pokok PBB hanya 25 persen untuk periode tunggakan 2013-2016. Adapun potongan biaya pokok PKB diterapkan bervariasi, yaitu 50 persen untuk tunggakan hingga 2012 dan 25 persen untuk tunggakan periode 2013-2016. "Kami masifkan lagi untuk sosialisasi," tutur Faisal.

Badan Pajak juga akan merazia kendaraan penunggak PKB dan BBNKB. Bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya, BPRD juga bakal menyasar para pemilik mobil mewah yang menunggak pajak. "Semoga bisa menutupi kekurangan (defisit anggaran)," kata Faisal.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, menerangkan bahwa pemerintah DKI masih memiliki waktu sekitar dua bulan untuk mengejar target pajak. Menurut dia, hingga akhir tahun ini, nilai pajak yang harus dikejar oleh BPRD sekitar Rp 9 triliun.

Saefullah optimistis kekurangan pajak tersebut masih bisa terkejar. Sebab, BPRD berpengalaman bisa memungut pajak hingga Rp 3,6 triliun selama November. "Kami juga (memiliki) pengalaman, pada Desember akhir, dapat (pajak masuk) Rp 5 triliun," kata dia di Balai Kota, kemarin.

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Jhonny Simanjuntak, mengatakan pendapatan dari PKB dan BBNKB seharusnya meningkat dengan sendirinya. Sebab, jumlah kendaraan di Jakarta juga terus bertambah.

Selain dari pajak kendaraan bermotor, Jhonny menyarankan BPRD untuk menggenjot pendapatan dari pajak restoran dan pajak hiburan. ●

"Pendapatan dari PKB dan BBNKB seharusnya meningkat dengan sendirinya."

Jhonny Simanjuntak
Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta